

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern saat ini kita memasuki era revolusi informasi, yang mana ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang canggih. Perkembangan teknologi melahirkan media baru (new media) yang mengubah cara berkomunikasi dan budaya masyarakat menjadi lebih transparan, inovatif, dan kreatif. Lebih jauh Nasrullah (2017) mengungkapkan bahwa media selalu disertai dengan sarana teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, radio merupakan representasi dari media audio, televisi merupakan representasi dari media audio-visual, dan internet merupakan representasi dari media siber atau dikenal sebagai media online. Pada dasarnya, perkembangan teknologi dalam hal teknologi komunikasi dan informasi memiliki kontribusi dalam menghadirkan keberagaman media.

Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi, Winston (1999) menjelaskan tiga tahap revolusi teknologi. Pertama revolusi pertanian, revolusi yang terjadi sekitar 8000 SM, manusia mulai menetap disuatu tempat dan mulai menghasilkan peradaban yang didasarkan pada ekonomi agrikultur. Kedua revolusi industri sekitar abad ke-18 industri, dimana tenaga manusia digantikan dengan mesin yang pada masa itu adalah mesin uap. Revolusi industri ini mengakibatkan pergeseran struktur masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Ketiga revolusi informasi dimulai pada abad ke-20. Kehadiran masyarakat agrikultur, industri dan informasi merupakan bukti bahwa teknologi mempengaruhi perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan perubahan teknologi tersebut kemudian dikemukakan oleh McLuhan (1964) sebagai determinisme teknologi bahwa perubahan sosial yang disebabkan oleh-oleh temuan-temuan dengan asumsi bahwa teknologi menjadi kunci bagi kemajuan masyarakat (Hartley dalam Aprilani, 2011; 160). Determinisme teknologi terhadap perubahan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Penemuan-penemuan baru, inovasi dan perkembangan teknologi memudahkan kegiatan manusia, memberi pengaruh besar kepada perkembangan nilai-nilai sosial, politik dan ekonomi. Perubahan-

perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak bagi masyarakat (Hawari, 1999).

Dalam Abidin (2014) yang dikutip dari Dewi & Lailiyah (2020; 160), berkembangnya teknologi dan inovasi yang diciptakan, maka semakin canggih teknologi yang kita gunakan. Teknologi komunikasi modern tersebar di seluruh kalangan masyarakat dan masyarakat tidak dapat menghindari hal tersebut. Cepat atau lambat perubahan akan terjadi. Teknologi menjadi salah satu agen berubahnya pola kehidupan sehari-hari. Teknologi membentuk cara berpikir manusia, berperilaku dimasyarakat dan teknologi itulah yang pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain.

Teknologi biasanya dipandang sebagai produk dan proses yang terdiri dari hardware dan software atau disebut perangkat keras dan perangkat lunak. Keduanya menjalankan fungsi sebagai media (perantara) dalam proses komunikasi. Berbicara komunikasi tentu tidak terlepas dari informasi. Informasi merupakan sumber daya paling penting dalam kehidupan terutama dalam suatu organisasi baik publik maupun swasta. Informasi adalah sumber daya pokok seperti material, uang, sumber daya manusia sehingga informasi bisa dianggap sebagai konsep abstrak ataupun sebagai komoditas dalam bentuk laporan ataupun surat. Informasi menentukan gerakan organisasi dan perubahan-perubahan organisasi dalam pengambilan keputusan. Dan masa sekarang informasi menentukan gerak organisasi dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi karena perannya dalam pengambilan keputusan (Adeoti-Adekeye (1997) dalam Puji Rianto, 2017).

Realitas perubahan sosial dalam perkembangan teknologi informasi dan masyarakat dipandang menarik. Manuel Castells (1996) dalam bukunya "The Rise of the Network Society Volume 1 of The Information Age: Economy, Society, and Culture, menyatakan bahwa dunia saat ini memasuki era informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi digital yang menyediakan berbagai bentuk jejaring organisasi dalam struktur sosial. Lebih lanjut Castells (2000) edisi kedua dengan judul yang sama, menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi di era revolusi informasi telah berkembang satu sistem sosial budaya baru, yakni virtual riil. Kemampuan membangun kemayaan yang nyata atau

real virtuality (Ritzer & Goodman, dalam Maharani 2019: 30-31). Sepemikiran dengan itu teori determinasi teknologi menjelaskan bahwa teknologi mempengaruhi budaya komunikasi dan interaksi sebagai sebuah perubahan sosial yang fenomenal dan menyebabkan masyarakat terdorong untuk membentuk masyarakat baru yang dikenal sebagai konsep “masyarakat Informasi” (McLuhan, 2003).

Teknologi membawa perubahan yang mengarah pada perbaikan hasil organisasi. Dalam hal ini teknologi membantu memastikan penggunaan sumber daya yang paling efisien, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas layanan, membangun kenyamanan yang lebih besar bagi pengguna, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi warga (Jackson & Philip dalam J. Ramon dkk, 2014: 257). Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi berpotensi meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pengelola pemerintah dan memberikan akses informasi yang lebih mudah bagi warga dan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan itu dalam Sulistyowati & Dibyarin (2013) sistem informasi tidak hanya sebagai pengambilan keputusan oleh para manajer, tetapi erat kaitannya dengan efektivitas pelayanan organisasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Bahkan dalam konteks sistem informasi desa dengan partisipasi warga masyarakat.

Kehadiran media baru (*new media*) telah mempengaruhi upaya organisasi, baik swasta maupun publik untuk mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi media baru (internet). Organisasi publik yakni badan-badan pemerintah dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik telah mengembangkan suatu upaya untuk membangun sistem informasi publik. Pemerintah bergantung pada pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan informasi untuk memenuhi tujuan mereka. Sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 86 ayat (3) UU yang menyatakan “Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia”. Dari uraian UU tersebut, sangat jelas yang dimaksud adalah Sistem Informasi Desa (SID) adalah seperangkat teknologi komputer berbasis internet.

Perihal wacana mengenai penerapan Sistem Informasi Desa berbasis internet sebenarnya sudah lama berkembang, jauh sebelum disahkannya Undang-Undang Desa. Salah satu organisasi masyarakat sipil telah mengembangkan aplikasi berbasis teknologi komputer tersebut untuk mengembangkan SID. Combine Resource Institution (CRI), berhasil merancang software dan mulai memperkenalkan kepada beberapa desa pada pertengahan Juni 2009. Desa pertama yang diperkenalkan SID adalah Desa Balantare, Kecamatan Kamelang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kemudian di awal tahun 2010, SID diperkenalkan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY.

Adapun beberapa tujuan dalam pengembangan SID ini, salah satunya yang paling utama yaitu agar pengolahan data lebih efektif dan efisien. Dalam laporan kajian yang dilakukan oleh Combine bahwa

Sistem informasi Desa (SID) sebenarnya tumbuh dalam merespon lingkungannya, kini menjadi embrio yang mampu memberikan akselerasi dalam tata pemerintahan yang baik. Namun luasnya awal kelahiran SID berangkat dari kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas dalam penyiapan data, memanggil data dan mengolah data tentang desa. aspek efektifitas dan efisiensi inilah yang menjadi penekanan lahirnya latar SID (Jahja dkk, 2012:20).

Program SID dirintis oleh Combine Resource Institution (CRI) sejak tahun 2010 untuk membantu pemerintah desa dalam mengembangkan sistem informasi dan komunikasi desa. Sistem Informasi Desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan menyampaikan informasi. Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat (https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf, diakses pada 16 Desember 2020, pukul 14.45 WIB) .

Saat ini SID dianggap sebagai instrumen atau kelengkapan yang perlu ada untuk mendukung tercapainya *good governance*. SID merupakan bagian dari Teknologi Informasi yang Tepat Guna dapat dilihat keberhasilan perkembangannya jika terdapat pengelolaan dan kelembagaan yang dibentuk untuk memastikan keberlanjutannya. Lebih lanjut Jahja dkk (2012) mengkaji SID sebagai teknologi dengan menggunakan dua aspek pendekatan untuk memastikan keberhasilan transfer teknologi, yaitu teknologi tepat guna

(*appropriate technology*) bahwa teknologi yang dirancang secara sederhana, dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat desa yang memiliki tingkat pemahaman teknis yang terbatas dan dapat diaplikasikan di tempat lain; dan penerimaan teknologi (*technology receptivity*) yakni kaitannya penerapan teknologi seperti perangkat mesin, tetapi juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses, yang disebut dengan perangkat lunak (*software*) dan pengorganisasian (*orgware*) dari teknologi (Jahja dkk, 2012: 65).

Lahirnya UU Desa mendorong pemanfaatan TIK sebagai kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat 2 dan 4 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa. Dalam menjawab tantangan pembangunan dan pengembangan desa berbasis teknologi informasi, pemerintah daerah telah berupaya mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) sejak tahun 2014. Beberapa kebijakan untuk akses teknologi informasi dan komunikasi oleh Kominfo melalui program Desa Berdering, Desa Pinter (Desa Punya Internet), Pusat Layanan Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Kecamatan (M-PLIK). (Sulistyowati Fadjarini, dkk. 2017)

SID dibangun dengan berbasis komputer dan *website*, sehingga setiap informasinya dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan lisensi SID dikembangkan dalam *platform* sistem perangkat lunak bebas dan terbuka (*free and open source software*), yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, dimodifikasikan maupun ditingkatkan kinerja kerjanya oleh siapapun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan di lapangan (Wilhelm Wau, 2012: 8).

Tabel 1. Daftar 75 Desa di Kabupaten Bantul yang menerapkan Sistem Informasi Desa (SID)

NO	KECAMATAN	DESA	ALAMAT URL
1	Srandakan	Poncosari	http://poncosari.bantulkab.go.id
2	Srandakan	Trimurti	http://trimurti-bantul.desa.id
3	Sanden	Gadingsari	http://gadingsari.bantulkab.go.id
4	Sanden	Gadingharjo	http://gadingharjo.bantulkab.go.id
5	Sanden	Srigading	http://srigading.bantulkab.go.id
6	Sanden	Murtigading	http://murtigading.bantulkab.go.id

7	Kretek	Tirtomulyo	http://tirtomulyo-bantul.desa.id
8	Kretek	Parangtritis	http://parangtritis.bantulkab.go.id
9	Kretek	Donotirto	http://donotirto.bantulkab.go.id
10	Kretek	Tirtosari	http://tirtosari-bantul.desa.id
11	Kretek	Tirtoharjo	http://tirtoharjo.bantulkab.go.id
12	Pundong	Seloharjo	http://seloharjo.bantulkab.go.id
13	Pundong	Panjangrejo	http://panjangrejo-bantul.desa.id
14	Pundong	Srihardono	http://srihardono.bantulkab.go.id
15	Bambangipuro	Sidomulyo	http://sidomulyo-bantul.desa.id
16	Bambangipuro	Mulyodadi	http://mulyodadi.bantulkab.go.id
17	Bambangipuro	Sumbermulyo	http://sumbermulyo.bantulkab.go.id
18	Pandak	Caturharjo	http://caturharjo.bantulkab.go.id
19	Pandak	Triharjo	http://triharjo.bantulkab.go.id
20	Pandak	Gilangharjo	http://gilangharjo.bantulkab.go.id
21	Pandak	Wijirejo	http://wijirejo.bantulkab.go.id
22	Pajangan	Tirwidadi	http://tirwidadi.bantulkab.go.id
23	Pajangan	Sendangsari	http://sendangsari.bantulkab.go.id
24	Pajangan	Guwosari	http://guwosari-bantul.desa.id
25	Bantul	Palbapang	http://palbapang.bantulkab.go.id
26	Bantul	Ringinharjo	http://ringinharjo.bantulkab.go.id
27	Bantul	Bantul	http://bantul.bantulkab.go.id
28	Bantul	Trirenggo	http://trirenggo.bantulkab.go.id
29	Bantul	Sabdodadi	http://sabdodadi.bantulkab.go.id
30	Jetis	Patalan	http://patalan.bantulkab.go.id
31	Jetis	Canden	http://canden.bantulkab.go.id
32	Jetis	Sumberagung	http://sumberagung.bantulkab.go.id
33	Jetis	Trimulyo	http://trimulyo.bantulkab.go.id
34	Imogiri	Selopamiro	http://selopamiro.bantulkab.go.id
35	Imogiri	Sriharjo	http://sriharjo.bantulkab.go.id
36	Imogiri	Wukirsari	http://wukisari.bantulkab.go.id
37	Imogiri	Kebonagung	http://kebonagung-bantul.desa.id
38	Imogiri	Karangtengah	http://karangtengah.bantulkab.go.id
39	Imogiri	Gririrejo	http://girirejo.bantulkab.go.id
40	Imogiri	Karangtalun	http://karangtalun.bantulkab.go.id
41	Imogiri	Imogiri	http://imogiri.bantulkab.go.id
42	Dlingo	Mangunan	http://mangunan.bantulkab.go.id
43	Dlingo	Muntuk	http://muntuk.bantulkab.go.id
44	Dlingo	Dlingo	http://dlingo-bantul.desa.id
45	Dlingo	Temuwuh	http://temuwuh.bantulkab.go.id
46	Dlingo	Terong	http://terong-bantul.desa.id
47	Dlingo	Jatimulyo	http://jatimulyo.bantulkab.go.id
48	Banguntapan	Baturetno	http://baturetno-bantul.desa.id
49	Banguntapan	Banguntapan	http://banguntapan.bantulkab.go.id
50	Banguntapan	Jagalan	http://jagalan.bantulkab.go.id
51	Banguntapan	Singosaren	http://singosaren.bantulkab.go.id

52	Banguntapan	Jambidan	http://jambidan.bantulkab.go.id
53	Banguntapan	Potorono	http://potorono.bantulkab.go.id
54	Banguntapan	Tamanan	http://tamanan.bantulkab.go.id
55	Banguntapan	Wirokerten	http://wirokerten.bantulkab.go.id
56	Pleret	Wonokromo	http://wonokromo.bantulkab.go.id
57	Pleret	Pleret	http://pleret-bantul.desa.id
58	Pleret	Segoroyoso	http://segoroyoso.bantulkab.go.id
59	Pleret	Bawurah	http://bawuran-bantul.desa.id
60	Pleret	Wonolelo	http://wonolelo.bantulkab.go.id
61	Piyungan	Sitimulyo	http://sitimulyo.bantulkab.go.id
62	Piyungan	Srimulyo	http://srimulyo-bantul.desa.id
63	Piyungan	Srimartani	http://srimartani.bantulkab.go.id
64	Sewon	Pendowoharjo	http://pendowoharjo.bantulkab.go.id
65	Sewon	Timbulharjo	http://timbulharjo.bantulkab.go.id
66	Sewon	Bangunharjo	http://bangunharjo.bantulkab.go.id
67	Sewon	Panggungharjo	http://panggungharjo.desa.id
68	Kasihan	Bangunjiwo	http://bangunjiwo-bantul.desa.id
69	Kasihan	Tirtonimolo	http://tirtonimolo.bantulka.go.id
70	Kasihan	Tamantirto	http://tamantirto.bantulkab.go.id
71	Kasihan	Ngestiharjo	http://ngestiharjo.bantulkab.go.id
72	Sedayu	Argodadi	http://argodadi.bantulkab.go.id
73	Sedayu	Argorejo	http://argorejo.bantulkab.go.id
74	Sedayu	Argosari	http://argosari.bantulkab.go.id
75	Sedayu	Argomulyo	http://argomulyo.bantulkab.go.id

Sumber: Dikominfo Kabupaten Bantul (2017) dalam Apriyansyah, Maullindina, dkk (2018)

Berdasarkan tabel diatas dari 75 Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Bantul salah satunya adalah Desa Murtigading. Secara administratif Desa Murtigading merupakan desa yang menjadi *pilot project* dalam penerapan SID terletak di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Desa yang berada di jantung kecamatan ini memiliki potensi besar terutama sebagai pengembangan kawasan perkotaan karena memiliki daerah strategis. Hampir seluruh kantor instansi pemerintah Kecamatan Sanden berada di wilayah ini.

Dalam struktur birokrasi, desa berada pada posisi susunan tata kelola pemerintahan paling bawah dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia dan tidak luput dari tuntutan perubahan. Pemerintahan Desa Murtigading pun tidak lepas atas tuntutan untuk melakukan perubahan pelayanan agar tidak tertinggal dengan pemerintahan di atasnya. Pemerintah Desa Murtigading memanfaatkan teknologi SID untuk mengatur regulasi susunan pengelolaan administrasi berbasis elektronik. Desa Murtigading telah

berupaya melakukan inovasi pelayanan publik yang cepat, tepat dan profesional. Dan dalam kurun waktu 7 tahun Desa Murtigading dinobatkan sebagai desa panutan dalam pemanfaatan SID berdasarkan pemutakhiran data dan informasi.

Pada hakekatnya Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Murtigading adalah upaya untuk perbaikan dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan keberhasilannya dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menguatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang responsif dan efisien. Perubahan paradigma ini tentunya mendorong perubahan teraktual di masyarakat terhadap pelayanan publik. Desa Murtigading merupakan salah satu desa yang berhasil memanfaatkan SID terutama dalam pelayanan publik. Berangkat dari hal ini, maka dalam penelitian ini peneliti ingin melihat pengembangan teknologi SID dalam menentukan perubahan sosial di desa Murtigading. Maka judul penelitian ini yaitu **“Perubahan Sosial pada Penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Murtigading, Kecamatan sanden, Kabupaten Bantul – DIY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan teknologi Siitem Informasi Desa (SID) menentukan perubahan sosial di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Desa (SID) oleh Pemerintah Desa dalam pelayanan publik di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
2. Untuk mengetahui perubahan pasca penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DIY.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting untuk peneliti dalam mengkaji penelitian yang hendak dilakukan. Selain dapat memperkaya wawasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian nantinya, penelitian terdahulu juga menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis.

Penelitian pertama oleh Eko Adi Prasetyo tahun 2009 dengan judul “E-government & perubahan sosial (studi deskriptif kualitatif mengenai perubahan struktural yang terjadi di dalam birokrasi dan pelayanan publik yang berbasis e-government di kantor catatan sipil Kabupaten Cilacap)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel adalah berdasarkan *Non Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini difokuskan pada aktivitas birokrasi di Kantor Sipil Kabupaten Cilacap. Peneliti mencoba menggambarkan pola perubahan sosial baik secara struktural maupun kultural terkait kebijakan pemerintah menerapkan praktik e-government sebagai salah satu sistem birokrasi dan layanan publik. Hasil penelitian adalah teknologi informasi dan komunikasi berupa internet atau jejaringan dan data memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem birokrasi. Secara struktural dapat dilihat perubahan yakni pertama, pembaharuan produk hukum yang sesuai dengan konsep e-government; kedua, perubahan mekanisme birokrasi baik antar tingkatan birokrasi maupun masyarakat; ketiga, adanya perubahan SDM dimana penambahan aparat desa yang melek teknologi yang mampu mengoperasikan komputer untuk kepentingan birokrasi. Sedangkan dalam ranah kultural, perubahan sosial nampak pada akses informasi dan proses komunikasi yang semakin terbuka antar masyarakat dengan pemerintah. E-government dianggap sebagai jawaban atas keresahan masyarakat yang selama ini menganggap birokrasi sebagai sebuah beban atau masalah, karena urusannya susah dan berbelit-belit. Dan pada akhirnya, adanya e-government semakin

memperkuat proses demokratisasi baik dalam birokrasi itu sendiri maupun dalam masyarakat.

Penelitian kedua oleh Heriansyah Priady (2019) berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Instagram di Humas Pemkab Bandung”. Objek dalam penelitian ini berfokus pada pemanfaatan media sosial yaitu instagram Humas Pemkab Bandung, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sosial media instagram Humas Pemkab Bandung, dan juga mengetahui hasil dari pemanfaatan media sosial instagram yang telah dilakukan oleh Humas Pemkab Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Determenisme Deknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mampu mengubah cara berpikir dan cara berperilaku dalam masyarakat. Humas Pemkab Bandung menggunakan perkembangan teknologi yaitu sosial media istagram untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Penelitian ketiga oleh Fadjarini Sulistyowati, MC. Candra Rusmala Dibyorin & B. Harisaptaning Tyas pada tahun 2017 dengan judul ‘Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi Sistem Informasi Desa’. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan SID di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, FGD, wawancara dan dokumentasi terhadap manfaat dan peranan SID Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Teknik analisa yang digunakan adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann. Dari hasil penelitian ditemukan: 1) Partisipasi masyarakat terhadap keberadaan SID diawali pada saat sistem ini dibelakukan; 2) Kemunculan partisipasi masyarakat karena adanya sinergi kerja sama antara masyarakat, aparat desa dan CRI; 3) program SID memberikan kemudahan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan desa. Informasi lebih mudah tersosialisasikan dan umpan balik dapat diterima oleh pemerintah desa.

Dari uraian beberapa penelitian terdahulu sebagai study pustaka maka peneliti merangkum dalam tabel review. Berikut tabel review penelitian sejenis:

Tabel 1.1 Review Penelitian

No	Nama peneliti/ Tahun peneliti	Judul Penelitian	Teori	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Eko Adi Prasetyo/ 2009	E-government & perubahan sosial (studi deskriptif kualitatif mengenai perubahan struktural yang terjadi di dalam birokrasi dan pelayanan publik yang berbasis e-government di kantor catatan sipil Kabupaten Cilacap)	Teori perubahan Sosial	Metode penelitian deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti perubahan sosial pada faktor birokrasi dan teknologi • Menggunakan metode deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang digunakan teori determinisme teknologi • Lokasi penelitian • Objek penelitian yakni SID
2	Heriansyah Priady/ 2019	Pemanfaatan Media Sosial Instagram di Humas Pemkab Bandung	Teori Determinisme Teknologi	Metode penelitian deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti perubahan sosial • Teori yang digunakan yaitu teori 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian berfokus pada pemanfaatan SID di Desa Murtigading

					determinisme teknologi	
					<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 	
3	Fadjarini Sulistyowati, MC. Candra Rusmala Dibyorin, B. Harisaptaning Tyas / 2017	Pelebagaan Partisipasi Masyarakat Sebagai Uapaya Implementasi Sistem Informasi Desa.	Teori Partisipasi	Metode penelitian deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Metode penelitian deskriptif kualitatif Objek penelitian Sistem Informasi Desa Meneliti partisipasi masyarakat dalam implementasi SID 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan teori determinisme untuk melihat perubahan sosial dalam partisipasi masyarakat Lokasi penelitian Teknik pengumpulan data tidak melaksanakan FGD

1.4.2 Landasan Teori

1.4.2.1 Determinisme Teknologi: Marshall McLuhan

Penemuan baru dalam bidang teknologi tentu menghasilkan perubahan pada teknologi yang melibatkan berbagai akibat sosial. Ada perbedaan beberapa pandangan para ahli mengenai teknologi terhadap perubahan sosial. Pandangan pertama yaitu, determinisme teknologi menganggap bahwa teknologi sebagai satu-satunya faktor perubahan sosial. Pandangan kedua, bahwa teknologi

hanyalah salah satu dari berbagai banyak faktor yang mendorong perubahan sosial. Dan pandangan ketiga, bahwa teknologi hanyalah sebatas alat dan cara yang sifatnya pasif. Penggunaannya tergantung dari kemauan dan kemampuan manusia (Demartoto, dalam Adi Prasetya, 2009: 11).

Para pendukung teori determinisme teknologi meyakini bahwa teknologi dapat mengubah masyarakat bahkan pada titik tertentu teknologi dapat menentukan masa depan masyarakat. Marshall McLuhan sebagai salah satu determinisme teknologi yaitu determinisme media, dengan frasenya yang sangat terkenal yaitu *'the medium is the message'*. Menurut McLuhan, media bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan pesan, tetapi memiliki peranan tertentu. Masyarakat tidak saja dipengaruhi oleh 'isi' tetapi juga oleh 'media' yang digunakan (Teguh Ratmanto, 2005: 45-46). Media merupakan inti dari perubahan manusia. Dalam bukunya *'Understanding the Media'* (McLuhan, 1964: 7),

"In a culture like ours, long accustomed to splitting and dividing all things as a means of control, it is sometimes a bit of a shock to be reminded that, in operational and practical fact, the medium is the message. This is merely to say that the personal and social consequences of any medium -- that is, of any extension of ourselves -- result from the new scale that is introduced into our affairs by each extension of ourselves, or by any new technology."

Pemikiran ini menegaskan bahwa media pada prinsipnya telah benar-benar mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku manusia itu sendiri. Dalam hal ini perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara komunikasi yang mana akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi secara individual yaitu cara berpikir, dalam masyarakat teknologi mendorong manusia untuk berubah dari satu era ke era teknologi yang lain. Misalnya, masyarakat suku yang tidak mengenal huruf menuju ke masyarakat yang mengenal tulisan dan kemudian menuju ke masyarakat yang menggunakan peralatan komunikasi cetak, lalu ke masyarakat yang menggunakan alat komunikasi elektronik. Dengan pemikirannya McLuhan berpendapat bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi.

Lebih lanjut McLuhan mengidentifikasi teknologi media yang memiliki peran penting dan mendominasi kehidupan manusia kedalam empat periode, yaitu (lih. Siti Meisyaroh, 2013: 40-41): **1) a tribal age** (era suku atau purba) dimana

pada era ini manusia hanya mengandalkan indera pendengaran dalam berkomunikasi berdasarkan narasi, cerita, dongeng dan sebagainya; **2) *literate age*** (era literal atau huruf) pada era ini sudah ditemukannya alfabet atau huruf. Di era ini cara komunikasi manusia banyak berubah. Indera pendengaran kehilangan eksistensinya dan bergeser pada indera penglihatan. Manusia tidak lagi berkomunikasi mengandalkan tuturan, tetapi lebih pada tulisan; **3) *a print age*** (era cetak) yaitu era ditemukannya mesin cetak dan menyebabkan alfabet semakin tersebar secara luas ke seluruh dunia. Kemunculan mesin cetak, kemudian media cetak, menjadikan manusia semakin bebas untuk berkomunikasi; **4) *electronic age*** (era elektronik), era dimana ditemukannya berbagai macam alat atau teknologi untuk komunikasi, seperti telegram, telepon, televisi, radio, komputer, internet dan sebagainya. Manusia hidup kemudian dinamakan sebagai '*global village*'. Media massa pada era ini mampu membawa manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya, dimanapun, kapan saja, dan saat itu juga.

Dari perkembangan-perkembangan yang terjadi dapat dikatakan bahwa penemuan inovasi teknologi tertentu dimulai dari bahasa (lisan dan tulisan), alat cetak hingga telegraf. Penemuan-penemuan inilah yang menentukan manusia bagaimana cara berperilaku dan berpikir dalam kegiatan komunikasi yang dilakukannya. Sepemikiran dengan McLuhan, Innis (dalam Galvin, 1994 dikutip dari Ratmanto, 2005: 46) meyakini bahwa media mempunyai peranan penting di dalam perubahan masyarakat. Media bukan hanya sekedar alat dan kehadirannya telah berdampak pada keseluruhan proses penyebaran pengetahuan atau pesan. Media yang berbeda akan memiliki dampak yang berbeda juga. Hal ini dikarenakan bukan isi saja yang memiliki bias tetapi juga pada media. Media yang terikat pada ruang (*space-binded*) akan menghadirkan masyarakat yang memiliki tradisi oral. Artinya bahwa kehadiran kelompok kecil masyarakat yang memiliki hak istimewa dalam menafsirkan pengetahuan. Sebaliknya media-media yang terkait dalam waktu (*time-binded*) berdampak pada munculnya kelompok masyarakat yang cenderung egalitarian yang berakar pada budaya tulisan. Pada masa ini semua masyarakat memiliki hak yang sama atas akses pengetahuan juga sehingga tidak lagi terdapat perbedaan kelas sosial dalam menafsirkan pengetahuan.

Gagasan dasar teori ini bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara komunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. McLuhan mengungkapkan bahwa media merupakan inti dari peradaban manusia. Teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Teknologi membentuk individu dalam hal bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari era teknologi yang satu ke era teknologi yang lain (McLuhan (1962) dalam Irwansyah, 2020: 169).

Teori Determinisme Teknologi semakin berkembang seiring dengan penemuan dan perkembangan teknologi komunikasi terutama dalam perkembangan media masa yakni ditemukannya komputer, CD-ROM dan internet. Lebih lanjut Korblum (2000) dikutip dari Dewi & Lailiyah (2020: 161), hubungan antara teknologi dan masyarakat adalah merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan masyarakat. Teknologi merupakan kunci yang mengendalikan perubahan dimasyarakat, perubahan sosial dikendalikan oleh inovasi dan penemuan baru yang terus menerus terjadi di bidang teknologi. Teori berkembang didukung oleh berkembangnya euforia media masa yang dirasakan memiliki peranan penting dalam pembentukan kultur masyarakat.

1.4.2.2 Perubahan Sosial

1.4.2.2.1 Definisi Perubahan Sosial

Perubahan dalam masyarakat merupakan salah satu ciri dinamisasi dalam masyarakat tersebut. Perubahan secara fisik relatif lebih mudah dipahami dan dilihat secara nyata, namun berbeda halnya dengan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan dalam sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Piotr Sztompka mengatakan perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, bahwa terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan.

Konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan yaitu: 1) perbedaan, yaitu suatu keadaan berbeda dengan keadaan lainnya yang telah mengalami perubahan; 2) Pada waktu berbeda, dalam hal ini bahwa

perubahan terjadi bukan dalam kurun waktu yang sama tetapi pada waktu yang berbeda; dan 3) diantara keadaan sistem sosial yang sama. Sistem yang dimaksudkan adalah satu kesatuan kompleks, terdiri dari berbagai antarhubungan dan dipisahkan dari lingkungan sekitarnya oleh batas tertentu. (Piotr Sztompka, 2017:3)

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pandang pengamatan. Sztompka mengatakan bahwa sistem sosial tidak hanya berdimensi tunggal, melainkan muncul sebagai gabungan hasil keadaan berbagai komponen sebagai berikut (Piotr Sztompka, 2017:3):

- 1) Unsur-unsur pokok (misalnya jumlah dan jenis individu serta tindakan mereka).
- 2) Hubungan antar-unsur (Misalnya ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antar-individu, integrasi)
- 3) Berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem (misalnya peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan-tindakan untuk melesterikan ketertiban sosial).
- 4) Pemeliharaan batas (misalnya kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya).
- 5) Subsistem (misalnya jumlah dan jenis seksi, segmen, atau divisi khusus yang dapat dibedakan).
- 6) Lingkungan (misalnya keadaan alam atau lokasi geopolik).

Menurut Farley (1990) dalam Sztompka (2004: 5) perubahan sosial merupakan perubahan dalam pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Pengertian Farley dapat diinterpretasikan dalam dua hal yaitu pertama, bahwa perubahan terjadi selalu berhubungan dengan komunitas yang didalamnya terdapat cara berpikir, bertindak sesuatu berdasarkan waktu. Kedua, suatu perubahan tidak terletak pada faktornya tetapi ditentukan oleh cara berpikir dan bertindak manusia. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat terjadi perubahan interaksi antara satu dengan yang lainnya ketika mereka melakukan tindakan dan perbuatan atas apa yang

dilakukan. Sejalan dengan itu, menurut Gillin dan Gillin (Leibo 1986: 53) dalam Indraddin & Iwan (2016: 2) ¹ mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima, berorientasi kepada perubahan kondisi geografis, kebudayaan, materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi dalam penemuan-penemuan hal baru.

Mengenai kajian perubahan sosial terhadap tiga hal yaitu studi mengenai perbedaan, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda dan pengamatan pada sistem sosial yang sama. Wilbert Moore, perubahan sosial bukan saja hanya pada masyarakat modern melainkan hal yang universal dalam pengalaman (Ranjar, 2008 dalam Irwan, 2016: 3). Pandangan tersebut menggambarkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dilihat pada sisi bentuk, nilai, faktor, penyebab, dan sebagainya. Melainkan terdapat hal yang membuat perubahan terjadi secara universal dalam diri maupun luar, serta cara yang dilakukan ketika perubahan terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dapat dilihat dalam beberapa definisi perubahan sosial berbagai pakar dengan meletakkan tekanan pada jenis perubahan yang berbeda. Namun sebagian besar mereka memandang penting perubahan struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antara unsur-unsur masyarakat²:

- 1) Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu (Macionis, 1987: 683).
- 2) Perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat (Persell, 1987: 586).
- 3) Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar-individu, kelompok, organisasi kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu (Ritzer, *et al.*, 1987: 560).
- 4) Perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur organisasi pada waktu tertentu (Farley, 1990: 626).

¹ Irwan dan Indraddin, *Strategi dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hal 2

² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan ...*, hal 5

Dengan berbagai definisi dan berbagai pemaparan seperti yang telah diutarakan di atas, berbagai ahli mendukung pemikiran Sztompka bahwa perubahan sosial memiliki pemahaman yang luas, yang mencakup seluruh ekspresi tatanan hidup masyarakat atau penekanan pada agen manusia “individu” dalam berbagai bidang termasuk nilai dan norma yang ada dalam masyarakat tertentu juga mengalami perubahan.

1.4.2.3 Dimensi Perubahan Sosial

Setiap individu pasti mengalami berbagai perubahan semasa hidupnya. Perubahan pengaruhnya dapat terbatas maupun luas, lambat dan ada juga perubahan yang berjalan cepat. Begitu pun sistem sosial dalam masyarakat senantiasa berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan tingkat perubahan masyarakatnya. Oleh karena itu, perubahan sosial memiliki dua dimensi, yaitu perubahan dalam ³:

- 1) Pola budaya; yang meliputi cara berpikir, nilai, norma, pengetahuan, kesenian, sarana benda-benda dan sebagainya.
- 2) Struktur sosial; yang meliputi organisasi sosial, sistem pelapisan, pembagian kekuasaan, sistem hubungan antar warga masyarakat.

Himes dan Moore (1967), menyebutkan tiga dimensi struktural dalam perubahan sosial yaitu ⁴:

1) Dimensi Struktural

Dimensi struktural mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk struktural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya dalam peranan baru, perubahan dalam struktural kelas sosial dan perubahan lembaga sosial. secara sederhana perubahan struktural dijelaskan sebagai berubahnya bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung dapat menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodifikasi secara terus-menerus.

2) Dimensi Kultural

³ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Pedesaan: Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa* (Yogyakarta: LP2M UPN “Veteran”, 2020). Hal 140

⁴ Ibid⁸. Hal 144

Perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (discovery) dalam beripikir (ilmu pengetahuan), pembaruan hasil (invention) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan sulit dipisahkan. Tetapi secara teoritis dapat dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan kebudayaan mengacu pada perubahan pola-pola perilaku, termasuk teknologi dan dimensi dari ilmu, material dan non-material.

3) Dimensi Interaksional

Perubahan dalam dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Modifikasi dan perubahan dalam struktur daripada komponen-komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Hal seperti frekuensi, jarak sosial, peralatan, keteraturan dan peranan undang-undang, merupakan skema pengaturan dari dimensi spesifik dari perubahan relasi sosial. Artinya, perubahan sosial dalam banyak hal dapat dianalisis dari proses interaksi sosial. Perubahan dalam dimensi struktural dan kultural sebetulnya tak bisa dipisahkan. Artinya, dalam perubahan struktural secara implisit juga dapat dindikasikan adanya perubahan kultural sekaligus.

1.4.2.4 Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/ KEP/ M.PAN/7/ 2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan publik maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud disini adalah pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan

yang cepat dan tepat agar masyarakat mendapatkan kepuasan pelayanan publik oleh pemerintah.

Ada tiga bentuk pelayanan publik menurut Keputusan Menteri yaitu;

1. Pelayanan administrasi; berupa pembuatan dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan lain-lain.
2. Pelayanan dalam pengadaan barang; pelayanan yang dapat menghasilkan barang dan dimanfaatkan oleh publik seperti pengadaan jembatan, jaringan listrik, telepon dan lain-lain.
3. Pelayanan jasa; pelayanan yang menghasilkan produk berupa jasa kepada publik, seperti transportasi, layanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya

Pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang sangat penting terutama dalam negara modern. Sebagai suatu lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan layanan dan pengelolaan sumber daya yang bersal dari dan untuk publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesioalisme dan etika seperti akuntabelitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas dan keadilan bagu semua penerima pelayanan.

Dalam ranah birokrasi pemerintahan, sikap dan perilaku petugas sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi nilai yang melekat dalam jiwa aparatur pemerintah. pemerintah sebagai penyedia layanan publik dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Rendahnya kualitas dan efektifitas telah menimbulkan dampak dalam berbagai dimensi sosial. Secara sosio-politik bruknya pelayanan publik menumbuhkan erosi kepercayaan dan sinime warga terhadap pemerintah yang pada sewaktu-waktu dapat mengancurkan ketertiban dan kedamaian masyarakat.

Dalam ranah ekonomi, berbagai bentuk korupsi dan rendahnya akuntabilitas dalam lembaga birokrasi telah menghambat pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak bukti-bukti empiis di berbagai negara dan Indonesia salah

satunya memperlihatkan bahwa korupsi berdampak negatif yang signifikan dalam infestasi dan perdagangan (Adi Prasetyo, 2009; 32-34).

Pembentukan *good governance* menjadi kebutuhan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan. Dwimawanti (2004; 111) terdapat dua hal pokok dalam keberhasilan pengembangan manajemen kualitas suatu organisasi yaitu:

1. Keinginan besar manajemen puncak untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas dalam organisasi;
2. Prinsip kualitas diakomodasikan dalam sistem manajemen kualitas

Dalam hal ini mewujudkan pelayanan yang berkualitas perlu adanya komitmen dan partisipasi dari pemimpin pemerintah daerah dan seluruh aparat untuk memberikan kepuasan pelayanan masyarakat. Komitmen pemerintah diperlukan untuk memperbaiki pelayanan masyarakat oleh unit pelayanan dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Menurut Zeithmal dkk (1990), kualitas pelayanan dapat lihat dalam 5 aspek yaitu, *Tangibel* (Berwujud) terdiri dari fasilitas fisik, peralatan dan personil komunikasi; *Reliability* (Kehandalan) terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; *Responsiviness* (Ketanggapan) terdiri dari kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan; *Assuarance* (Jaminan) terdiri dari tepat waktu, biaya, kepastian; dan *Empathy* (Empati) terdiri dari sikap menghargai, sopan santun, ramah, tidak diskriminasi.

1.4.2.5 Teknologi Informasi dan Sistem Informasi

1.4.2.4.1 Definisi Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Teknologi dilihat sebagai alat bantu individu yang digunakan untuk menjalankan tugasnya. Dalam konteks sistem informasi, teknologi menunjukkan sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan data, dan pendukung bagi pengguna (pelatihan dan bantuan) yang disediakan untuk membantu pengguna dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berbagai macam definisi mengenai teknologi informasi oleh para ahli dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang teknologi informasi.⁵

- 1) Ellay (1983: 45) teknologi informasi adalah mencakup sistem-sistem komunikasi seperti satelit siaran langsung, kabel interaktif dua arah, penyiaran bertenaga rendah, komputer dan televisi.
- 2) Haag dan Keen (1996) teknologi informasi merupakan seperangkat alat bantu yang dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam melakukan pekerjaannya dan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan pemrosesan data informasi.
- 3) Martin (1999), teknologi informasi tidak terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk menyimpan dan memproses informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi.
- 4) William dan Sawyer (2009) teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi dengan kecepatan yang tinggi membawa data, suara, dan video.

Dari berbagai difinisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi. Artianya bahwa teknologi informasi merupakan perpaduan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.

1.4.2.4.2 Sistem Informasi

Sistem informasi mengandung tiga konsep yaitu sistem, informasi dan desa. Meskipun memiliki definisi yang berbeda-beda, ketika disatukan maka akan lahir defini baru yang pastinya saling berkaitansatu dengan yang lain.

Schrode and Voich (1974) sistem berarti satu kesatuan dari beberapa bagian, pertalian antar unit atau komponen yang seatu dengan komponen yang lain (dalam Award, 1979 dikutip dalam Abdul Shomad, 2018:64). Campble

⁵ Kasemin, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi (Prenada Media: 2016). Hal 19

(1979) sistem merupakan interelasi komponen atau bagian-bagian dalam suatu grup yang memiliki fungsi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sependapat dengan itu Saarbon dan Bodart (2000) menjelaskan sistem sebagai kumpulan berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mendapatkan objek umum⁶.

Informasi adalah kumpulan fakta atau data yang memiliki arti. Lucas (1994) mengatakan bahwa informasi merupakan interpretasi atas data untuk menyodorkan arti yang dilakukan secara individual. Thompson dan Hendelmen informasi adalah data yang diproses dan dianalisa untuk digunakan.

Sistem informasi sebagaimana menurut Jogiyanto (1999) mendefinisikan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Data adalah fakta atau gambaran berbentuk mentah, data mewakili pengukuran atau pengamatan obyek-obyek kejadian kemudian data diolah menjadi informasi. Proses transformasi dari data ke informasi inilah yang disebut dengan sistem informasi (dikutip dalam Suryati dan Purnama, 2010: 34).

1.4.2.4.3 Sistem Informasi Desa (SID)

Kemajuan teknologi informasi menjadi tantangan global, dimana era *voice* (suara) atau komunikasi telah berubah menjadi era data yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah informasi. Data merupakan suatu yang penting bagi pemerintah daerah misalnya diperlukan untuk menganalisis data potensi daerah, strategi pengembangan daerah serta membantu dalam upaya pemenuhan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, adanya teknologi informasi dan komunikasi telah membantu pemerintah dalam mempercepat proses administrasi masyarakat.

Sistem Informasi Desa adalah serangkaian proses yang melibatkan antar komponen (struktur maupun infrastruktur, perangkat keras maupun lunak, dan sumber daya alam maupun manusia) sesuai fungsinya masing-masing, untuk

⁶ Shomad, Abdul. Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik Vol 8 No 2. 2018: 62-80

mencapai tujuan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, kemudahan aksesibilitas dan partisipatif. Sistem Informasi Desa meniscayakan terciptanya pemerintahan desa yang baik dan bersih (*good and clean village government*) untuk kesejahteraan masyarakat desa (Abdul Shomad (2018: 64).

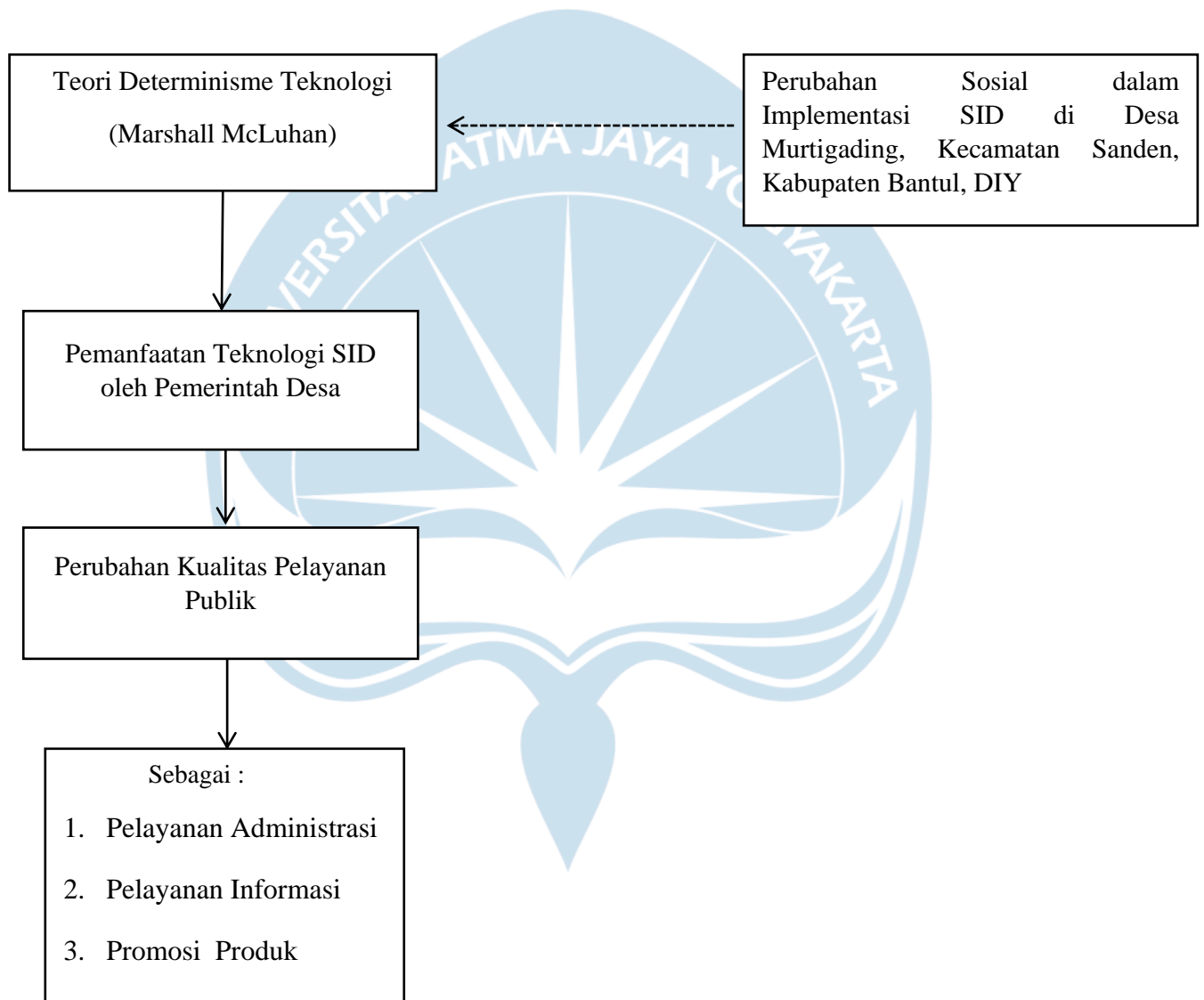
Sistem Infomasi Desa (SID) merupakan rangkaian dari beragam teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa. Sistem yang dibangun sejak tahun 2009 oleh Combine Resourche Institution, digunakan untuk mendukung percepatan dan kualitas kerja pelayanan publik oleh perangkat desa kepada masyarakat desa setempat.

Desa pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri dalam hal komunikasi dan informasi. Desa memiliki sistem informasi yang berkembang dengan mekanisme papan pengumuman dan komunikasi lisan. Namun, data terus berkembang dalam ukurannya maka dibutuhkan fasilitas lain untuk mengelola agar lebih konseptual dan sistematis. Beberapa alasan lahirnya SID, antara lain:

- 1) Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital. Banyak data yang tidak terselamatkan pada saat gempa, sehingga langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkan bentuk arsip dari *hardcopy* menjadi *softfile*;
- 2) Ada suatu kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa cepat dan tepat;
- 3) Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat terbuka (*open source*) dan gratis agar tidak membebani keuangan desa;
- 4) Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) tidak dibagikan kembali ke desa. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut juga menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan terpadu.

Penggunaan teknologi SID berbasis internet ini, guna menambah akses untuk memberikan pelayanan jasa dari pemerintah kepada masyarakat.

Keterhubungan pemerintah dan masyarakat secara elektronik tentu bertujuan agar masyarakat bisa mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan dari pemerintah.



Bagan 1. Kerangka Berpikir